



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
BIDANG STUDI *PUBLIC RELATIONS*
PUJI LESTARI
44210010054

KOALISI DOMINAN PADA BIRO SEKRETARIS PERUSAHAAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR PUSAT DALAM Mendukung PROSES TRANSFORMASI MENUJU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PERIODE 2013

Jumlah Halaman : i-xii + 109 Halaman + 105 Lampiran
Bibliografi : 18 Acuan , Tahun 1989 – 2010

ABSTRAK

Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat kedudukannya tepat dibawah Direktur Utama yang dapat bertanggung jawab langsung kepada manajemen dalam pengendalian informasi dan menjadi fungsi strategis yang bertanggung jawab terhadap hubungan organisasi dengan stakeholdernya, maka konsekuensinya *Public relations* harus ditempatkan dalam posisi *Top Management*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Koalisi Dominan Pada Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Koalisi Dominan. Seperti yang diutarakan oleh James E. Grunig bahwa koalisi dominan memiliki 3 dimensi yaitu *Public Relations* sebagai Pembuat Keputusan Strategis, *Public Relations* sebagai *Boundary Spanner*, dan Manajemen Strategik, sebagai mana tertera dalam buku karangan James E. Grunig, *Excellence in Public Relations and Communication Management*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan *key informan* dan *informan*.

Hasil penelitian ini membahas bahwa koalisi dominan pada biro sekretaris perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat tidak mewakili konsep yang digunakan dalam penelitian ini dimana level kepala biro bertanggung jawab dengan pengambilan keputusan internal biro, sedangkan koalisi dominan perusahaan berada pada BOD (*Board of Director*) dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan tertinggi.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa Biro Sekretaris Perusahaan (BSP) dapat ditempatkan pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu BOD (*Board of Director*), agar memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan pada level *department* yang dipimpin maupun rekomendasi rumusan kebijakan dan keputusan yang lebih tinggi yaitu level Korporat.